Prinsip Rasionalistis Menurut Hugo Gratius Dalam Penerimaan Rohingya Di Aceh

Rhenaldo Billy P, Kazziba Luthfi Akbar, Reva Berliana, Sheren Sesiola. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. berlianareva28@gmail.com

ABSTRACT: One of the events that is currently thought to threaten the security and resilience of the country is the arrival of the Rohingya to Indonesia, an event that has the potential to affect the security and resilience of the country. In dealing with these events, applying the principle of rationality can be an important basis for managing the related risks. Based on this description, the author finds two problems, namely (1) What is Hugo Gratius' view in his thoughts regarding rationalistic principles? and (2) What are the rationalistic principles according to Hugo Gratius in accepting the Rohingya in Aceh? The research specification used is descriptive analysis. The normative approach in legal research is focused on the normative juridical approach. The research stage involved the library research stage. And the analytical method used is qualitative juridical. The conclusion obtained is that Hugo Grotius's view of the principle of rationality is that this principle is the basis of objective morals and justice, and is the basis for understanding and following natural laws that apply universally. And the rationalistic principle according to Hugo Gratius in accepting Rohingya in Aceh is that it can be applied to consider human rights, humanity and justice in providing protection and assistance to those facing crisis or conflict situations to maintain the security and defense of one's own country so as to avoid social jealousy.

KEYWORDS: Rationality, Hugo Gratius, and Rohingya.

ABSTRAK: Salah satu peristiwa yang saat ini diduga akan mengancam keamanan dan ketahanan negara adalah peristiwa kedatangan Kaum Rohingya ke Indonesia, merupakan peristiwa yang dapat memiliki potensi untuk mempengaruhi keamanan dan ketahanan negara. Dalam menghadapi peristiwa ini, penerapan prinsip rasionalitas dapat menjadi landasan penting untuk mengelola risiko yang terkait. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menemukan dua permasalahan, yaitu (1) Bagaimana pandangan Hugo Gratius dalam pemikirannya mengenai prinsip rasionalistis ? dan (2) Bagaimana prinsip rasionalistis menurut

Hugo Gratius dalam penerimaan Rohingya di Aceh ?Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum ini difokuskan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan melibatkan tahap penelitian kepustakaan. Dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan Hugo Grotius terhadap prinsip rasionalitas adalah bahwa prinsip ini merupakan dasar moral dan keadilan yang objektif, serta menjadi landasan untuk memahami dan mengikuti hukum alam yang berlaku universal. Dan prinsip rasionalistis menurut Hugo Gratius dalam penerimaan Rohingya di Aceh adalah dapat diterapkan untuk mempertimbangkan hak asasi manusia, kemanusiaan, dan keadilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang menghadapi situasi krisis atau konflik untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara sendiri sehingga dapat menghindari terjadinya kecemburuan sosial.

KATA KUNCI: Rasionalitas, Hugo Gratius, dan Rohingya.

I. PENDAHULUAN

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori mendasar yang berkaitan dengan hukum. Filsafat Hukum mencoba untuk memahami esensi hukum, sifatnya, tujuannya, asal-usulnya, dan bagaimana hukum berhubungan dengan nilai-nilai moral, politik, dan sosial. (Ahmad Tafsir, 2016, p. 75)

Filsafat Hukum melibatkan pemeriksaan kritis terhadap konsep-konsep hukum seperti keadilan, kebebasan, kekuasaan, tanggung jawab, dan hak asasi manusia. Filsafat Hukum juga mempertanyakan asal-usul dan dasar-dasar hukum, seperti apakah hukum berasal dari kehendak Tuhan, logika, atau keputusan manusia. (Amsal Bakhtiar, 2017, p. 75)

Tujuan dari Filsafat Hukum adalah untuk memahami hukum secara mendalam dan kritis, melampaui aspek teknis dan praktisnya. Filsafat Hukum bertujuan untuk memberikan landasan teoretis yang kokoh bagi pemahaman tentang hukum, serta mendorong refleksi dan perdebatan tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Dalam praktiknya, Filsafat Hukum melibatkan analisis konsep dan argumen hukum, penggunaan logika dan metodologi filsafat untuk menganalisis teori-teori dan perdebatan hukum, serta penelitian dan kajian terhadap teks-teks hukum dan doktrin hukum. Filsafat Hukum berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum dan sistem hukum. Dalam konteks ini, Filsafat Hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hak asasi manusia, keadilan, etika hukum, dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum. (Lorens Bagus, 2005, p. 209)

Selain itu, Filsafat Hukum juga memberikan kontribusi dalam merumuskan teori-teori hukum yang berbeda, seperti positivisme hukum, naturalisme hukum, konstruktivisme hukum, dan hukum kritis. Teori-teori ini membantu dalam memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang kompleks dan kontroversial. Secara keseluruhan, Filsafat Hukum merupakan disiplin ilmu yang penting dalam memahami dan membahas hukum secara kritis, teoretis, dan reflektif.

Melalui Filsafat Hukum, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang sifat dan tujuan hukum, serta implikasinya dalam masyarakat dan kehidupan manusia.

Tokoh Hugo Grotius adalah seorang pemikir yang terkait dengan konsep hukum alam. Dalam studi filsafat hukum, Grotius diakui sebagai seorang pemikir yang menganut pendekatan rasional dalam hukum alam. Pemikirannya tentang hukum menarik perhatian, terutama karena ia hidup pada masa peralihan Abad Pertengahan dan pergeseran pengetahuan yang terjadi pada masa itu. Pada masa tersebut, peran akal budi dan kemampuan berpikir logis semakin penting, dan hal ini mempengaruhi model pengembangan hukum yang digagas oleh Grotius. (Hugo Grotius, 2012, p. 71) Melalui pendekatannya yang lebih rasional, humanis, dan sekular, Grotius mencoba mengembangkan konsep hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan pemikiran pada zamannya. (Aulia Rahmat, 2019, p. 435)

Dalam diskusi mengenai pemikiran hukum, Hugo Grotius diakui sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum di dunia, terutama dalam konteks hukum internasional. Grotius memiliki bakat yang unik dan pandangan yang berbeda terhadap hukum dalam konteks sosial dan sejarah yang mengelilinginya, yang akhirnya membawanya pada suatu temuan menarik. Grotius berpendapat bahwa sumber utama hukum adalah akal budi, bukan Tuhan. Dalam konteks ini, Grotius juga dikaitkan dengan sekularisasi hukum alam. (Arliman Laurensius, 2018, p. 181)

Salah satu pemikiran Grotius adalah Prinsip Rasionalitas. Salah satu pemikiran yang diusung oleh Hugo Grotius adalah prinsip rasionalitas. Grotius meyakini bahwa hukum harus didasarkan pada akal budi dan pemikiran yang rasional. Menurutnya, hukum harus dapat dipahami dan diterima secara logis oleh manusia. Grotius berpendapat bahwa hukum yang rasional akan lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat. Prinsip rasionalitas ini menjadi dasar bagi pemikiran Grotius dalam

mengembangkan konsep hukum alam dan hukum internasional. (Rato, 2023, p. 319)

Prinsip rasionalitas ini harus diterapkan dalam setiap peristiwa untuk menghindari risiko-risiko yang dapat mengancam keamanan dan ketahanan negara. Prinsip rasionalitas yang diusung oleh Grotius sebenarnya tidak hanya berlaku dalam konteks hukum, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai peristiwa untuk menghindari risiko-risiko yang dapat mengancam keamanan dan ketahanan negara. Dengan pendekatan yang rasional, keputusan dan tindakan yang diambil dapat didasarkan pada pemikiran yang logis dan objektif, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau keputusan yang tidak efektif.

Dalam konteks keamanan dan ketahanan negara, prinsip rasionalitas dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional. Dengan menggunakan akal budi dan pemikiran yang rasional, para pemimpin dan pengambil keputusan dapat menganalisis secara objektif ancaman- ancaman yang ada, mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk melindungi kepentingan negara. (Shaver Robert, 1999, p. 63)

Dengan menerapkan prinsip rasionalitas, risiko-risiko yang dapat mengancam keamanan dan ketahanan negara dapat diidentifikasi dengan lebih baik, sehingga langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang efektif dapat diambil. Prinsip ini juga memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan strategi yang diterapkan, berdasarkan analisis dan pemikiran yang rasional. (Kinsella, 2006, p. 161)

Dengan demikian, prinsip rasionalitas dapat menjadi panduan penting dalam mengelola risiko keamanan dan ketahanan negara, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada pemikiran yang logis dan efektif.

Salah satu peristiwa yang saat ini diduga akan mengancam keamanan dan ketahanan negara adalah peristiwa kedatangan Kaum

Rohingya ke Indonesia, tepatnya di Sabang, Aceh Nangroe Darussalam. Kedatangan Kaum Rohingya ke Indonesia, khususnya di Sabang, Aceh Nangroe Darussalam, memang merupakan peristiwa yang dapat memiliki potensi untuk mempengaruhi keamanan dan ketahanan negara. Dalam menghadapi peristiwa ini, penerapan prinsip rasionalitas dapat menjadi landasan penting untuk mengelola risiko yang terkait. (Hesti Puji Lestari, 2023, p. 1)

Kedatangan Kaum Rohingya ke Indonesia dapat membawa beberapa risiko yang terkait dengan keamanan dan ketahanan negara. Beberapa risiko yang mungkin timbul antara lain :

- a. Risiko keamanan;
- b. Risiko sosial;
- c. Risiko kesehatan;
- d. Risiko ekonomi;
- e. Risiko publik.

Dalam menghadapi risiko-risiko ini, penerapan prinsip rasionalitas dalam pengambilan keputusan dan langkah-langkah penanganan dapat membantu pemerintah dalam mengelola peristiwa kedatangan Kaum Rohingya dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Prinsip Rasionalistis Menurut Hugo Gratius Dalam Penerimaan Rohingya Di Aceh.

II. METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap isu-isu hukum, fakta, dan fenomena hukum terkait dengan pendekatan hukum.

Melalui penelitian ini, akan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai masalah yang sedang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang akan menggambarkan kondisi objek atau permasalahan yang sedang diteliti, tanpa memiliki niat untuk membuat atau menarik kesimpulan yang berlaku secara umum mengenai prinsip rasionalistis menurut Hugo Gratius dalam penerimaan Rohingya di Aceh. (Soerjono Soekanto, 2010, p. 81)

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum ini difokuskan pada penggunaan sumber data kepustakaan, yang melibatkan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa sumber hukum utama, sumber hukum pendukung, atau sumber hukum tambahan. (Ronny Hanitijo, 2000, p. 24)

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan melibatkan tahap penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dalam penelitian. Data yang akurat dapat diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. (Marzuki, 2012, p. 15)

4. Metode Analisis

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif yang sesuai dengan fokus penelitian. Metode yuridis kualitatif ini melibatkan pengumpulan data secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti, tanpa melibatkan penggunaan rumus matematis. Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian akan diorganisir secara sistematis dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan. (Bambang Mudjiyanto, 2014, p. 3)

III. HASIL PENELITIAN

Kedatangan pengungsi Rohingya menjadi topik yang hangat dibicarakan di masyarakat. Ketidakjelasan status mereka di negara asalnya mendorong mereka untuk melarikan diri ke berbagai wilayah di Asia, terutama ASEAN. Tingginya gelombang kedatangan pengungsi ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah. (Syifa Rahmadina, 2023, p. 1)

Awal mula kedatangan etnis Rohingya di Myanmar dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Inggris di negara tersebut. Etnis Rohingya datang untuk membantu Inggris, yang akhirnya menyebabkan ketidaksimpatian dari rakyat Myanmar terhadap mereka. Tujuan utama pemberontakan etnis Rohingya adalah mendirikan negara mereka di wilayah Arakan, Myanmar. Hal ini memunculkan kekhawatiran pemerintah Myanmar akan munculnya gerakan separatis. Baru-baru ini, Wakil Presiden Indonesia mengusulkan pengungsian sementara para pengungsi ke pulau Galang di Sumatera. (Syifa Rahmadina, 2023, p. 1)

Sebelumnya, terdapat laporan tentang pelanggaran norma sosial oleh pengungsi di Aceh, yang membuat masyarakat setempat resah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kehadiran pengungsi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal.

Kedatangan Kaum Rohingya ke Indonesia dapat membawa beberapa risiko yang terkait dengan keamanan dan ketahanan negara. Beberapa risiko yang mungkin timbul antara lain:

1. Risiko Keamanan: Kedatangan Kaum Rohingya dapat menciptakan tantangan keamanan, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan terhadap individu atau kelompok yang mungkin memiliki niat atau keterlibatan dalam kegiatan ekstremisme atau kejahatan terorganisir. Risiko ini membutuhkan penanganan yang cermat untuk memastikan bahwa keamanan nasional tetap terjaga;

2. Risiko Sosial: Kedatangan Kaum Rohingya juga dapat menciptakan ketegangan sosial dan konflik antara kelompok masyarakat lokal dan mereka yang datang sebagai pengungsi. Perbedaan budaya, agama, dan bahasa dapat menjadi faktor yang memicu konflik atau ketidakharmonisan sosial. Risiko ini perlu dikelola dengan baik untuk mencegah eskalasi ketegangan dan mempromosikan integrasi yang harmonis antara pengungsi dan masyarakat lokal;
3. Risiko Kesehatan: Kondisi kesehatan dan sanitasi yang buruk di antara pengungsi Rohingya dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit, terutama dalam situasi yang padat dan kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Risiko ini harus ditangani dengan memberikan perawatan medis yang memadai dan memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sesuai;
4. Risiko Ekonomi: Kedatangan Kaum Rohingya juga dapat memiliki dampak ekonomi, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, kehadiran mereka dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, seperti dalam sektor perdagangan, jasa, atau industri terkait. Namun, ada juga risiko negatif, seperti peningkatan persaingan dalam pasar tenaga kerja atau peningkatan permintaan terhadap sumber daya dan infrastruktur yang ada; dan
5. Risiko Politik: Kedatangan Kaum Rohingya dapat memiliki dampak politik, terutama dalam hubungan dengan negara asal mereka dan negara-negara lain di kawasan. Hal ini dapat mempengaruhi diplomasi, kebijakan luar negeri, dan kerjasama regional. Risiko ini memerlukan koordinasi dan negosiasi yang efektif antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara terkait untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama.

IV. PEMBAHASAN

A. Pandangan Hugo Gratius Dalam Pemikirannya Mengenai Prinsip Rasionalistis

Hugo Grotius (juga dikenal sebagai Hugo de Groot) adalah seorang filosof, teolog, dan ahli hukum Belanda yang hidup pada abad ke-17. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam perkembangan hukum internasional modern. Karya terkenalnya, *On the Law of War and Peace (De jure belli ac pacis)*, diterbitkan pada tahun 1625 dan dianggap sebagai salah satu karya paling berpengaruh dalam bidang hukum internasional. Grotius juga berkontribusi dalam bidang teologi, filsafat, dan politik, dan dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat hukum alam. Ia mendukung gagasan bahwa ada prinsip-prinsip hukum universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia, terlepas dari agama atau negara mereka. Hugo Grotius dianggap sebagai tokoh penting dalam perkembangan pemikiran hukum dan politik di Eropa. (Silke-Petra Bergjan, 2009, p. 42)

Salah satu pemikiran dari Hugo Gratius adalah prinsip rasionalitas. Hugo Gratius berpendapat bahwa prinsip rasionalitas adalah prinsip yang mendasari hukum alam. Menurutnya, manusia memiliki akal budi yang memungkinkan mereka untuk berpikir secara rasional dan menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan. Prinsip rasionalitas ini mengacu pada kemampuan manusia untuk memahami dan mengikuti hukum alam yang berlaku secara objektif, di mana tindakan yang sesuai dengan rasionalitas dianggap sebagai tindakan yang benar dan adil. Dalam konteks hukum, prinsip rasionalitas ini menekankan pentingnya pemikiran logis dan adil dalam membuat keputusan hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan. (Marco Barducci, 2017, p. 101)

Hugo Grotius memandang prinsip rasionalitas sebagai prinsip yang sangat penting dalam hukum alam. Baginya, manusia memiliki kemampuan akal budi yang memungkinkan mereka untuk berpikir secara rasional dan menggunakan akal sehat dalam mengambil

keputusan. Grotius berpendapat bahwa prinsip rasionalitas ini merupakan dasar dari moralitas dan keadilan yang objektif.

Menurut Grotius, prinsip rasionalitas memberikan dasar untuk memahami dan mengikuti hukum alam yang berlaku secara universal. Tindakan yang sesuai dengan rasionalitas dianggap sebagai tindakan yang benar dan adil. Dalam konteks hukum, Grotius menekankan pentingnya pemikiran logis dan adil dalam membuat keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan.

Grotius juga menggunakan prinsip rasionalitas untuk mendukung gagasan bahwa terdapat prinsip-prinsip hukum universal yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari agama atau negara mereka. Ia berargumen bahwa prinsip-prinsip ini dapat ditemukan melalui akal budi yang rasional dan dapat diterapkan dalam konteks hubungan internasional. Dengan demikian, pandangan Hugo Grotius terhadap prinsip rasionalitas adalah bahwa prinsip ini merupakan dasar moral dan keadilan yang objektif, serta menjadi landasan untuk memahami dan mengikuti hukum alam yang berlaku universal.

B. Prinsip Rasionalistis Menurut Hugo Gratius Dalam Penerimaan Rohingya Di Aceh

Prinsip rasionalitas dapat menjadi panduan penting dalam mengelola risiko keamanan dan ketahanan negara, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada pemikiran yang logis dan efektif.

Salah satu peristiwa yang saat ini diduga akan mengancam keamanan dan ketahanan negara adalah peristiwa kedatangan Kaum Rohingya ke Indonesia, tepatnya di Sabang, Aceh Nangroe Darussalam. Kedatangan Kaum Rohingya ke Indonesia, khususnya di Sabang, Aceh Nangroe Darussalam, memang merupakan peristiwa yang dapat memiliki potensi untuk mempengaruhi keamanan dan ketahanan negara.

Pada tahun 2015, terjadi gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga, dan pada tahun 2023 Kaum Rohingya datang ke Indonesia. Banyak dari mereka yang tiba di perairan Aceh setelah perjalanan yang berbahaya melintasi Laut Andaman. Masyarakat Aceh dan pemerintah setempat merespons dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya.

Kedatangan kaum Rohingya ke Aceh juga menimbulkan kontroversi di beberapa aspek. Berikut adalah beberapa kontroversi yang terkait dengan kedatangan mereka:

1. Penolakan awal: Meskipun banyak masyarakat Aceh dan pemerintah setempat yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya, terdapat juga sebagian masyarakat yang menentang kedatangan mereka. Beberapa kelompok masyarakat Aceh mengkhawatirkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang mungkin timbul akibat peningkatan jumlah pengungsi;
2. Kondisi penampungan: Ketika pengungsi Rohingya tiba di Aceh, mereka ditempatkan dalam penampungan sementara seperti kamp- kamp pengungsian. Terdapat kontroversi mengenai kondisi penampungan tersebut, termasuk masalah sanitasi, akses terhadap layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Beberapa kelompok masyarakat dan LSM mengkritik kondisi tersebut dan menuntut perbaikan;
3. Keberlanjutan: Kontroversi juga muncul terkait dengan keberlanjutan penampungan dan masa depan pengungsi Rohingya di Aceh. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa penampungan sementara tersebut mungkin menjadi tempat tinggal permanen bagi mereka, yang dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi dalam jangka panjang; dan

4. Isu keamanan: Kedatangan pengungsi Rohingya juga menimbulkan kekhawatiran terkait isu keamanan. Ada kekhawatiran bahwa ada pihak-pihak yang dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk kegiatan ilegal, seperti perdagangan manusia atau penyelundupan narkoba.

Seharusnya dalam menghadapi peristiwa kedatangan kaum Rohingya ke Indonesia menggunakan atau mempertimbangkan prinsip rasionalitas menurut Hugo Gratius. Berdasarkan prinsip rasionalitas yang dikemukakan oleh Grotius, dapat diasumsikan bahwa ia akan menekankan pentingnya pemikiran logis dan adil dalam menghadapi situasi seperti kedatangan pengungsi Rohingya. Grotius meyakini bahwa prinsip rasionalitas adalah landasan moral dan keadilan yang objektif, yang dapat digunakan untuk memahami dan mengikuti hukum alam yang berlaku universal.

Dalam konteks penerimaan pengungsi, prinsip rasionalitas dapat diterapkan untuk mempertimbangkan hak asasi manusia, kemanusiaan, dan keadilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang menghadapi situasi krisis atau konflik. Penerimaan pengungsi dapat dipandang sebagai tindakan yang sesuai dengan rasionalitas dan moralitas, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum alam yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip rasionalistis menurut Hugo Gratius dalam penerimaan Rohingya di Aceh adalah dapat diterapkan untuk mempertimbangkan hak asasi manusia, kemanusiaan, dan keadilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang menghadapi situasi krisis atau konflik untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara sendiri sehingga dapat menghindari terjadinya kecemburuan sosial.

V. KESIMPULAN

Pandangan Hugo Grotius terhadap prinsip rasionalitas adalah bahwa prinsip ini merupakan dasar moral dan keadilan yang objektif, serta menjadi landasan untuk memahami dan mengikuti hukum alam yang berlaku universal. Dan prinsip rasionalistis menurut Hugo Gratius dalam penerimaan Rohingya di Aceh adalah dapat diterapkan untuk mempertimbangkan hak asasi manusia, kemanusiaan, dan keadilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang menghadapi situasi krisis atau konflik untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara sendiri sehingga dapat menghindari terjadinya kecemburuan sosial.

Dalam konteks penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh, penting untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara sendiri. Namun, hal ini tidak berarti menghindari penerimaan pengungsi atau membatasi bantuan kemanusiaan. Prinsip rasionalitas dapat membantu dalam menemukan keseimbangan antara memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sambil tetap menjaga keamanan dan pertahanan negara dengan cara yang adil dan proporsional. Sehingga dalam menerima pengungsi maka penting untuk mengutamakan pendekatan yang rasional dan berbasis pada hak asasi manusia dalam menangani isu penerimaan pengungsi.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Tafsir. (2016). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rosda.
- Amsal Bakhtiar. (2017). *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*. Jakarta: RajaGraindo Persada.
- Arliman Laurensius. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 181.
- Aulia Rahmat. (2019). Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 435.
- Bambang Mudjiyanto. (2014). *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Hesti Puji Lestari. (2023). Selebgram India Beberkan Risiko jika Rohingya Masuk ke Indonesia. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20231217/15/1724566/selebgram-india-beberkan-risiko-jika-rohingya-masuk-ke-indonesia>
- Hugo Grotius. (2012). *Commentary on the Law of Prize and Booty*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Kinsella, H. M. (2006). Gendering Grotius: Sex and Sex Difference on Laws of War. *Political Theory*, 34(2), 161.
- Lorens Bagus. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marco Barducci. (2017). *Hugo Grotius and the Century of Revolution 1613-1718: Transnational Reception in English Political Thought*. New York: Oxford University Press.

- Marzuki, P. M. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rato, D. (2023). Pengaruh Teori Kant dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal. *Jurnal Hukum Pidana*, 1(2), 34.
- Ronny Hanitijo. (2000). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Shaver Robert. (1999). *Grotius on Scepticism and Self-Interest*. Brookfield: Ashgate Publishing Company.
- Silke-Petra Bergjan. (2009). *Property, Piracy and Punishment: Hugo Grotius on War and Booty in de Iure Praedae - Concepts and Contexts*. Leiden: Brill.
- Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Syifa Rahmadina. (2023). Soal Pengungsi Rohingnya, Diterima atau Ditolak? Ini Kata Dosen UNAIR. Retrieved from <https://unair.ac.id/soal-pengungsi-rohingnya-diterima-atau-ditolak-ini-kata-pakar-unair/>